

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK

MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019

*Gross Regional Domestic Product of Depok Municipality
by Expenditure 2015 - 2019*

Nomor ISBN : 978-602-0925-91-2

Nomor Publikasi/Publication Number : 32760.2005

Katalog/Catalog : 9302020.3276

Ukuran Buku/Book Size : 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages : xiv + 71 halaman

Naskah/Manuscript :

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Penyunting/Editor:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Penerbit/Published by:

© BPS Kota Depok

Pencetak/Printed by:

CV. Coqelat Visitama

Sumber Ilustrasi/Graphics by:

Bambang Pamungkas

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA DEPOK
MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019**

Penanggung Jawab Umum :
Ahmad Muhammad Saleh, SE

Penanggung Jawab Teknis :
Bambang Pamungkas, S.ST

Editor:
Ika Widyastuti, S.ST
Edi Pramono

Penulis dan Pengolahan Data :
Bambang Pamungkas, S.ST

Desain/Lay out :
Ario Priambodo, A.Md

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal ini Kota Depok. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh pihak yang telah saling membantu dan bekerjasama dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Depok, Mei 2020

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Kepala,



Ahmad Muhammad Saleh, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	13
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	15
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5. Perubahan Inventori (PI)	22
2.6. Ekspor Impor	24
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA DEPOK MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2015-2019	27
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	36
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	40
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	41
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	44
3.2.5. Perubahan Inventori	46
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa	47

BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA DEPOK	49
4.1. PDRB (Nominal)	51
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	52
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR PUSTAKA	69

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019	30
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019	31
Tabel 3. Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019.....	33
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019	35
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok, Tahun 2015-2019.....	36
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Depok Tahun 2015-2019	38
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2015-2019	39
Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok , Tahun 2015-2019	40
Tabel 9. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRRT Kota Depok, Tahun 2015-2019.....	41
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok, Tahun 2015-2019	43
Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok Tahun 2015-2019	45
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Depok, Tahun 2015-2019.....	46

Tabel 13. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Depok, 2015-2019	52
--	----

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019	30
Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019	32
Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	33
Grafik 4. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019	59
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	60
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	61
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	62
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	63
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019	64
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019	65
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	66
Tabel 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019	67

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019.....	68
---	----

<https://depokkota.bps.go.id>



<http://idepokkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (*impor*). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi

menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (final output)”**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Depok menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan

konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi.

Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.
 - Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



<http://telepoker.orabps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI

DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;

6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);

6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan

pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Depok mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kota Depok mencakup:

- a. PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kota Depok ;
- b. PK-P Kota Depok yang bersangkutan;
- c. PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Depok.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Depok tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Badan Keuangan Daerah
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Badan Keuangan Daerah
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kota Depok Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku =

Output - Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks

PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate*

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi

pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar

BPS

3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. EKSPOR - IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kota Depok terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kota Depok
- b. Import dari luar Kota Depok .

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Depok didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Depok diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



BAB III

TINJAUAN

PEREKONOMIAN

KOTA DEPOK

MENURUT PDRB

PENGELUARAN

TAHUN 2015-2019

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Pengeluaran Kota Depok atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 10,38 %, yakni dari 64.363,78 miliar Rupiah menjadi 71.041,99 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka peningkatannya lebih riil karena tidak terpengaruh faktor inflasi, yakni dari 45.978,89 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 49.076,63 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 6,74 %.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, kondisi ini menjadi berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami pertumbuhan positif, perekonomian Kota Depok periode 2010 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 6 %, yakni sebesar 6,36 %; 6,81 %; 8,06 %; 6,85 %; 7,28 %; 6,64 %; 7,28 %; 6,75 %; 6,97 %, serta 6,74 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada kategori Real Estate yang tumbuh 10,84 %. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Depok didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari 124,01 % total PDRB.

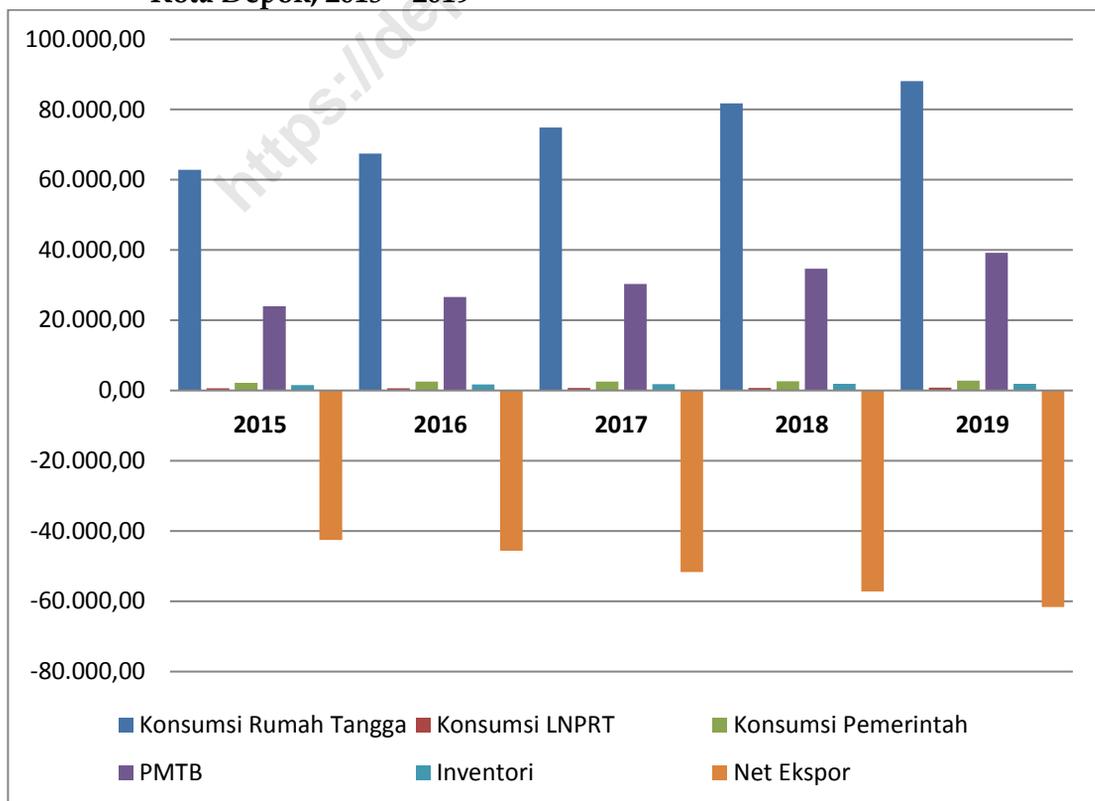
Pada periode tahun 2010 - 2019 PDRB Kota Depok atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 26.601 miliar Rupiah (2010); 29.594 miliar Rupiah (2011); 33.283 miliar Rupiah (2012); 38.627 miliar Rupiah (2013); 43.806 miliar Rupiah (2014); 48.532 miliar Rupiah (2015); 53.331 miliar Rupiah (2016); 58.408 miliar Rupiah (2017); 64.363 miliar Rupiah (2018); dan 71.041 miliar Rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Depok pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Depok Tahun 2015 - 2019**

(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	62 810,93	67 440,12	74 880,46	81 709,24	88 098,28
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	659,22	636,54	670,52	728,74	778,18
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	2 126,78	2 533,80	2 487,92	2 588,60	2 774,78
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	23 936,48	26 630,42	30 270,44	34 633,17	39 192,77
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	1 524,21	1 717,35	1 818,54	1 893,08	1 877,58
6 Ekspor / <i>Export</i>	31 292,78	33 713,04	38 093,37	42 888,34	46 918,85
7 Impor / <i>Import</i>	73 817,76	79 340,22	89 812,47	100 077,93	108 598,45
PDRB / GRDP	48 532,64	53 331,05	58 408,78	64 363,25	71 041,99

**Grafik 1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Depok, 2015 - 2019**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Depok pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015 - 2019

(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran / Expenditure item	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	49 757,92	51 808,60	55 033,94	57 983,05	60 789,18
2 Konsumsi LNPRT / NPISH Consumption	501,44	470,66	483,82	508,71	524,66
3 Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	1 454,28	1 668,93	1 594,77	1 628,96	1 735,80
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	18 253,30	19 861,64	21 769,17	23 967,94	25 862,03
5 Perubahan Inventori / Changes of Inventory	1 101,43	1 137,48	1 138,39	1 122,08	1 094,38
6 Ekspor / Export	28 431,99	29 566,55	34 796,98	36 857,28	38 452,11
7 Impor / Import	61 970,89	64 250,62	71 835,79	76 089,13	79 381,53
PDRB / GRDP	37 529,47	40 263,24	42 981,28	45 978,89	49 076,63

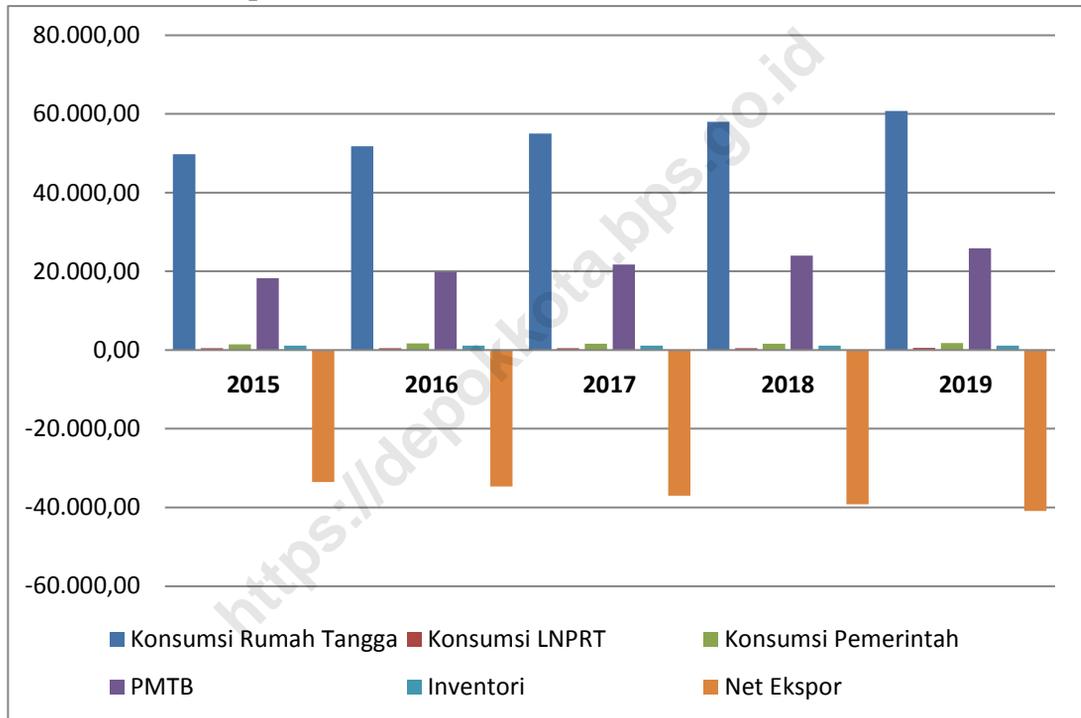
Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Depok meningkat, yakni sebesar 26.601 miliar Rupiah (2010); 28.412 miliar Rupiah (2011); 30.703 miliar Rupiah (2012); 32.805 miliar Rupiah (2013); 35.192 miliar Rupiah (2014); 37.529 miliar Rupiah (2015); 40.263 miliar Rupiah (2016); 42.981 miliar Rupiah (2017); 45.978 miliar Rupiah (2018); dan

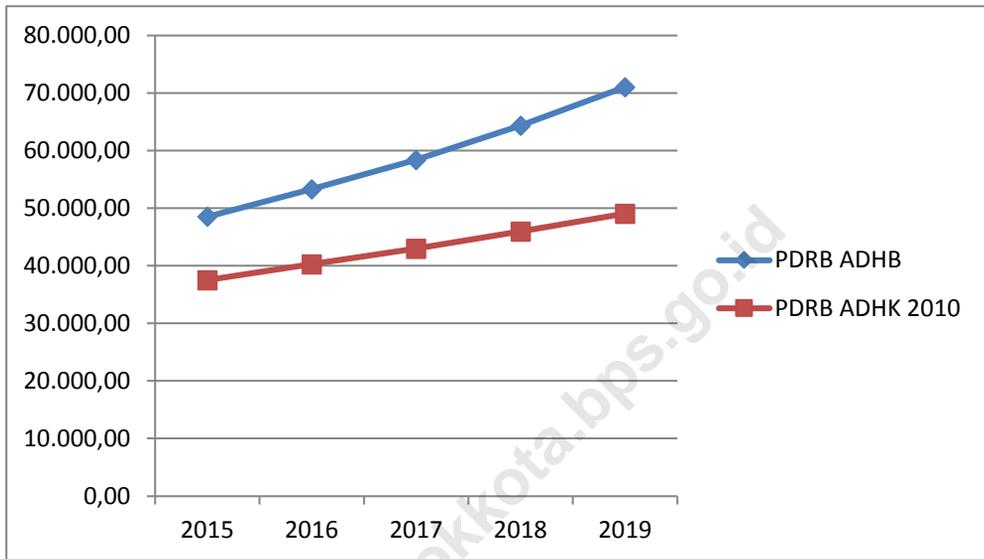
49.076 miliar Rupiah (2019). Sedangkan dari Grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Depok cenderung mengalami pertumbuhan dengan nilai positif / meningkat, yakni dari 6,36 persen pada tahun 2010 menjadi 6,79 persen pada tahun 2019.

Grafik 2 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015 - 2019



Dari Grafik 3, dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Grafik 3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019



Tabel 3 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015 - 2019

(%)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	129,42	126,46	128,20	126,95	124,01
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	1,36	1,19	1,15	1,13	1,10
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	4,38	4,75	4,26	4,02	3,91
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	49,32	49,93	51,83	53,81	55,17
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	3,14	3,22	3,11	2,94	2,64
6 Ekspor / <i>Export</i>	64,48	63,21	65,22	66,63	66,04
7 Impor / <i>Import</i>	152,10	148,77	153,77	155,49	152,87
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, PDRB Kota Depok, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni berkisar pada angka 55,17 persen.

Kota Depok tidak memiliki industri dalam skala besar yang banyak, maka ketergantungan terhadap barang import dari luar kota juga sangat tinggi. Bila dilihat dari besaran angkanya, maka Kota Depok masih termasuk dalam kota dengan kategori net import, artinya *import* nya lebih besar dari nilai *eksport* nya

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 3 – 5 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam pembentukan PDRB sangat kecil dan tidak begitu dominan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pergerakan roda perekonomian Kota Depok masih sangat bergantung barang produksi dari kabupaten kota lainnya. Sehingga selisih perdagangan / ekspor dan impor di Kota Depok selalu dalam kondisi “defisit”. Kedefisititan ini salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya kaum komuter yang tinggal di Kota Depok. Pada tahun 2019, jumlah komuters diestimasi sudah mencapai enam ratus ribuan orang. Mereka ini sehari harinya sebagai motor perekonomian di luar Kota Depok, khususnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mereka ini pula yang banyak membelanjakan uangnya di luar Kota Depok untuk kemudian dibawa masuk ke Kota Depok

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok sejak tahun 2002 selalu di atas 6 persen, hal ini menunjukkan bahwa Kota Depok sedang melaju kencang dalam perekonomian. Secara struktur terjadi pergeseran dari Sekunder ke Tersier.

Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2015 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Depok melaju kencang, yakni sebesar 6,81 persen (2011); 8,06 persen (2012); 6,85 persen (2013); 7,28 persen (2014); 6,64 persen

(2015); 7,28 persen (2016); 6,75 persen (2017); 6,97 persen (2018); dan 6,74 persen (2019). Sedangkan dari Grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

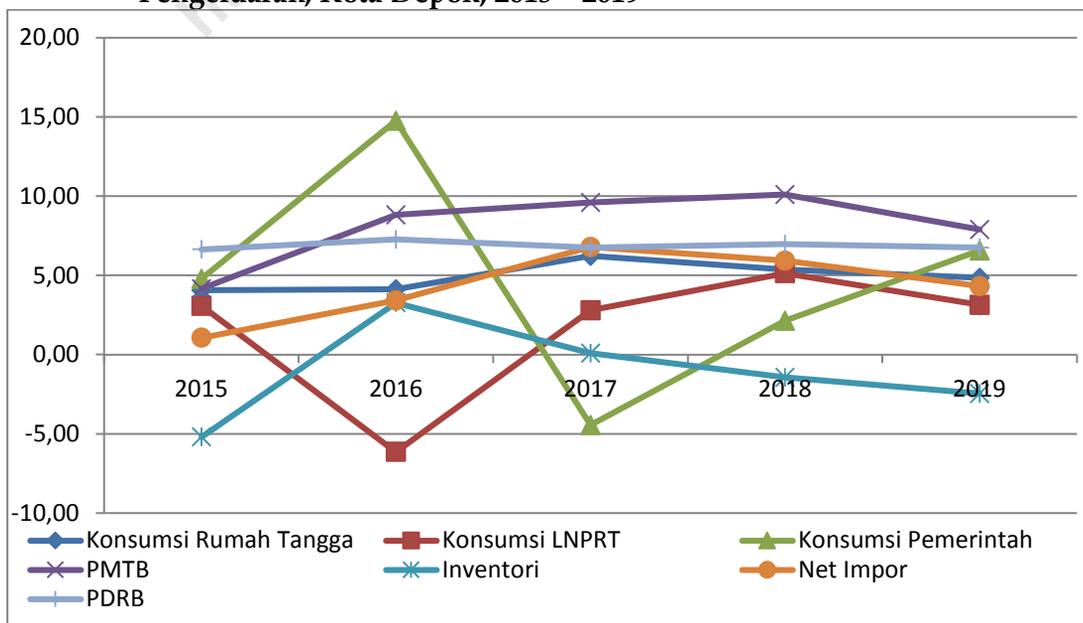
Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran / <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	4,06	4,12	6,23	5,36	4,84
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	3,07	(6,14)	2,80	5,14	3,14
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	4,79	14,76	(4,44)	2,14	6,56
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4,16	8,81	9,60	10,10	7,90
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	(5,19)	3,27	0,08	(1,43)	(2,47)
6 Net Impor / <i>Net Import</i>	1,07	3,41	6,79	5,92	4,33
PDRB / <i>GRDP</i>	6,64	7,28	6,75	6,97	6,74

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Grafik 4 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015 - 2019



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 – 2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran / <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	126,23	130,17	136,06	140,92	144,92
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	131,47	135,24	138,59	143,25	148,32
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	146,24	151,82	156,00	158,91	159,86
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	131,14	134,08	139,05	144,50	151,55
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>	138,38	150,98	159,75	168,71	171,57
6 Net Impor / <i>Net Import</i>	126,79	131,55	139,63	145,77	150,70
PDRB / <i>GRDP</i>	129,32	132,46	135,89	139,98	144,76

Keterangan: *) angka sementara
*) angka sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan

⁶ Indeks perkembangan

inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Depok untuk periode 2015 – 2019.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Depok ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Depok maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2010 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 149,03 persen (2010); 147,00 persen (2011); 143,79 persen (2012); 135,50 persen (2013); 132,10 persen (2014); 129,42 persen (2015); 126,46 persen (2016); 128,20 persen (2017); 126,95 persen (2018); dan 124,01 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 149,03 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 124,01 persen.

Pada masa percepatan pertumbuhan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi

karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Tabel 6 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Depok Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga / Total of Household Consumption	62 810,93	67 440,12	74 880,46	81 709,24	88 098,28
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)					
b. ADHK 2010 /2010 Constant Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)	49 757,92	51 808,60	55 033,94	57 983,05	60 789,18
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	129,42	126,46	128,20	126,95	124,01
Rata-rata konsumsi per-Kapita / Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)	29 823,31	30 938,49	33 213,59	35 063,33	36 603,51
a. ADHB / Current Prices (Ribu Rp / Thousand Rp)					
b. ADHK 2010/ 2010 Constant Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	23 625,60	23 767,45	24 410,57	24 881,87	25 256,99
Pertumbuhan/Growth ⁷	4,06	4,12	6,23	5,36	4,84
a. Total konsumsi RT/ Total of Household Consumption					
b. Perkapita/Per capita	0,47	0,60	2,71	1,93	1,51
Jumlah penduduk / Number of population (orang/person)	2 106 102	2 179 813	2 254 513	2 330 333	2 406 826

Keterangan: *) angka sementara
*) angka sangat sementara

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2010, setiap orang di Kota Depok secara rata-rata membelanjakan uang sekitar Rp 22 581 145,- setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut berturut-turut meningkat menjadi Rp 23.861.074,- (2011); Rp 25.294.868,- (2012); Rp 26.673.953,- (2013); Rp 28.457.036,- (2014); Rp 29.823.309,- (2015); Rp 30.938.489,- (2016); Rp

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

33.213.585,- (2017); Rp 35.063.332,- (2018); dan pada tahun 2019 menjadi Rp 36.603.510,- Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita sembilan delapan tahun terakhir ini tumbuh sebesar 1,26 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 0,47 s d 2,71 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Depok, Tahun 2015 - 2019

Kelompok Konsumsi / <i>Consumption group</i>	(%)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok / <i>Food, beverages, and tobacco</i>	26,86	28,52	29,66	29,98	31,21
b. Pakaian dan Alas Kaki / <i>Clothing and footwear</i>	2,61	2,59	2,54	2,55	2,53
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga / <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	9,82	9,59	9,58	9,39	9,00
d. Kesehatan & Pendidikan / <i>Health and education</i>	7,19	7,26	6,93	6,95	7,06
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya / <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	37,01	35,87	35,34	35,29	34,29
f. Hotel & Restoran / <i>Hotels, and restaurants</i>	12,75	12,46	12,41	12,31	12,38
g. Lainnya / <i>Miscellaneous goods and services</i>	3,76	3,71	3,54	3,53	3,54
Total Konsumsi / <i>Total of consumption</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur komponen konsumsi rumah tangga Kota Depok pada periode tahun 2015-2019 tidak banyak mengalami perubahan. Konsumsi rumahtangga di Kota Depok yang terbesar masih untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya serta untuk makanan, minuman, dan rokok. Nilai konsumsi masyarakat

Kota Depok untuk kedua jenis kelompok konsumsi tersebut mencapai 65,50 persen pada tahun 2019.

Tabel 8 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2015 - 2019

Kelompok Konsumsi / Consumption group	(%)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	4,50	8,64	3,68	3,27	5,44
b. Pakaian dan Alas Kaki / <i>Clothing and footwear</i>	1,14	1,63	3,04	3,98	2,78
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga / <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	6,27	1,28	5,29	1,96	(0,80)
d. Kesehatan & Pendidikan / <i>Health and education</i>	4,00	3,55	2,69	4,74	5,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya / <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	5,25	0,24	5,23	4,39	1,21
f. Hotel & Restoran / <i>Hotels, and restaurants</i>	1,16	1,25	2,94	2,33	2,14
g. Lainnya / <i>Miscellaneous goods and services</i>	2,57	2,07	4,47	1,89	1,96
Total Konsumsi / Total of consumption	4,31	3,12	4,53	3,57	2,84

Keterangan: *) angka sementara
*) angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan pada Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada tahun 2019 kelompok konsumsi yang mengalami peningkatan harga tertinggi adalah Makanan, minuman, dan rokok, kemudian peningkatan harga yang terendah ada pada kelompok pengeluaran Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan

akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Depok Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a ADHB (Milyar Rp)	659,22	636,54	670,52	728,74	778,18
b ADHK 2010 (Milyar Rp)	501,44	470,66	483,82	508,71	524,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,36	1,19	1,15	1,13	1,10
Pertumbuhan (ADHK 2010)	3,07	(6,14)	2,80	5,14	3,14

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT sebesar 659,22 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 636,54 miliar rupiah (2016); 670,52 miliar rupiah (2017); 728,74 miliar rupiah (2018); dan 778,18 miliar rupiah (2019). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 3,07 persen (2015), -6,14 persen (2016), 2,80 persen (2017), 5,14 persen (2018), dan 3,14 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 karena adanya persiapan Pilpres 2019.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah :

- Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).

- c. *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri :

- a. *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
- b. *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan, sedangkan atas dasar harga konstan 2010, pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 mengalami sedikit penurunan.

Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.126,78 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.533,80 miliar rupiah (2016), 2.487,92 miliar rupiah (2017), 2.588,60 miliar rupiah (2018) dan 2.774,78 miliar rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2015 sebesar 1.454,28 miliar rupiah, pada tahun 2016 sebesar 1.668,93 miliar rupiah, pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan menjadi 1.594,77 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1.628,96 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 menjadi 1.735,80 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas walaupun dengan range pertumbuhan yang tidak terlalu lebar.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB Kota Depok pada kurun waktu 2015-2019 juga mengalami fluktuasi dengan range yang sangat sempit dari 3,91 sd 4,38 persen,

berikut ini rincian per tahunnya, dari 4,38 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 4,75 persen pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 4,26 persen, kemudian pada tahun 2018 menjadi 4,08 persen, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 3,91 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,91 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,75 persen.

Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a ADHB (Miliar Rp)	2 126,78	2 533,80	2 487,92	2 588,60	2 774,78
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 454,28	1 668,93	1 594,77	1 628,96	1 735,80
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	4,38	4,75	4,26	4,02	3,91
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp) Kapita					
a ADHB	1 009,818	1 162,392	1 103,527	1 110,828	1 152,879
b ADHK 2010	690,506	765,628	707,370	699,025	721,201
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a ADHB	270 961,97	354 575,64	348 154,98	362 244,45	388 298,40
b ADHK 2010	185 281,82	233 546,75	223 170,24	227 954,27	242 905,80
Pertumbuhan 8)					
a Total konsumsi pemerintah	4,79	14,76	(4,44)	2,14	6,56
b Konsumsi perkapita	1,18	10,88	(7,61)	(1,18)	3,17
c Konsumsi per-pegawai pemerintah	2,39	26,05	(4,44)	2,14	6,56
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁸	7 849	7 146	7 146	7 146	7 146
Jumlah penduduk (orang)	2 106 102	2 179 813	2 254 513	2 330 333	2 406 826

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat

⁸ Tidak termasuk polisi dan militer

merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.009.000 rupiah terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.162.392 rupiah (2016); 1.103.527 rupiah (2017); 1.110.828 rupiah (2018) dan mencapai 1.152.879 rupiah pada tahun 2019.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 dan 2018, dengan masing-masing senilai 690.506 rupiah (2015); 765.628 rupiah (2016); 707.370 rupiah (2017); 699.025 rupiah (2018) dan 721.201 rupiah (2019). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas pada tahun 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,37 persen (2014) dan menjadi 4,79 persen (2015). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita menjadi 14,7,69 persen (2016); (-4,44) persen (2017); 2,14 persen (2018) dan 6,56 persen (2019).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 270.961,97 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 354.575,64 ribu rupiah (2016); 348.154,98 ribu rupiah (2017); 362.244,45 ribu rupiah (2018) dan 388.298,40 ribu rupiah (2019).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang

sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuasi dari 4,16 persen (2015) menjadi 7,90 persen (2019), sementara di tahun lainnya masing-masing 8,81 persen (2016); 9,60 persen (2017) dan 10,10 persen (2018). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018, hal ini disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur di Kota Depok.

Tabel 11 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	23 936,48	26 630,42	30 270,44	34 633,17	39 192,77
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18 253,30	19 861,64	21 769,17	23 967,94	25 862,03
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	49,32	49,93	51,83	53,81	55,17
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (Miliar Rp)	19 822,21	22 034,90	25 094,49	28 630,70	32 968,89
(%)	82,81	82,74	82,90	82,67	84,12
b. Non Bangunan (Mil Rp)	4 114,27	4 595,52	5 175,95	6 002,46	6 223,88
(%)	17,19	17,26	17,10	17,33	15,88
Total PMTB (Miliar Rp)	23 936,48	26 630,42	30 270,44	34 633,17	39 192,77
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	4,03	9,15	9,94	10,11	9,99
b. Non Bangunan	4,76	7,24	8,02	10,08	(2,24)
Total PMTB	4,16	8,81	9,60	10,10	7,90

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Depok, Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 524,21	1 717,35	1 818,54	1 893,08	1 877,58
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 101,43	1 137,48	1 138,39	1 122,08	1 094,38
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,14	3,22	3,11	2,94	2,64
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHK)	2,93	2,83	2,65	2,44	2,23

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen

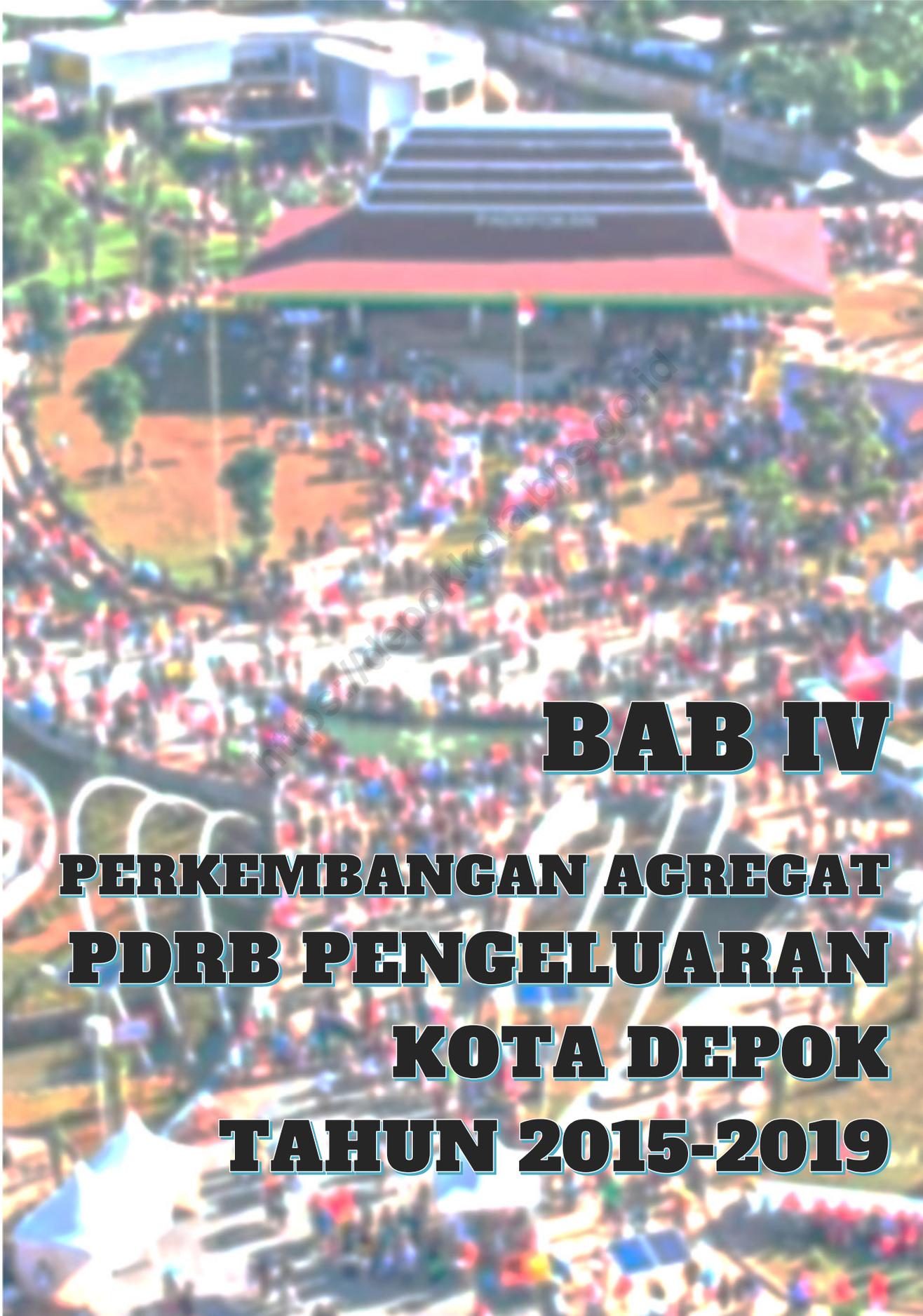
inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 1.524,21 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 1.717,35 miliar rupiah dan 1.818,54 miliar rupiah. Pada tahun 20178 perubahan inventori mencapai 1.893,08 miliar rupiah, tahun 2019 kembali mencapai 1.877,58 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Depok mengalami kecenderungan penurunan tipis. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 3,14 persen, selanjutnya 3,22 persen (2016), 3,11 persen (2017), 2,94 persen (2018) dan 2,64 persen (2019). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh mulai maraknya perdagangan dalam sistem perdagangan online dan biasanya berasal dari luar daerah (ekspor), hal ini menyebabkan pedagang konvensional mengalami penumpukan stock dari tahun sebelumnya.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Depok, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.



<http://depo.kotabps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA DEPOK TAHUN 2015-2019

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Selain dianalisis secara deskriptif terhadap nominal PDRB, dapat juga dilakukan analisis proporsi pengeluaran konsumsi akhir terhadap PDRB, *Average Propensity To Consume* (APC) dan *Average Propensity To Save* (APS), serta analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Analisis turunan lanjutan dari PDRB yang bisa dilakukan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi pendukung yang ada.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Depok di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	48 532,64	53 331,05	58 408,78	64 363,25	71 041,99
- ADHK 2010	37 529,47	40 263,24	42 981,28	45 978,89	49 076,63
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	23 044	24 466	25 907	27 620	29 517
- ADHK 2010	17 819	18 471	19 065	19 731	20 391
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	2 106 102	2 179 813	2 254 513	2 330 333	2 406 826
Pertumbuhan Penduduk (%)	3,57	3,50	3,43	3,36	3,28

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 14 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Depok, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)	65 596,93	70 610,45	78 038,90	85 026,58	91 651,24
a Rumah Tangga	62 810,93	67 440,12	74 880,46	81 709,24	88 098,28
b LNPRT	659,22	636,54	670,52	728,74	778,18
c Pemerintah	2 126,78	2 533,80	2 487,92	2 588,60	2 774,78
PDRB ADHB (Miliar Rp)	48 532,64	53 331,05	58 408,78	64 363,25	71 041,99
Proporsi	135,16	132,40	133,61	132,10	129,01

Keterangan: *) angka sementara
 **) angka sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2019, nilai total konsumsi akhir selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai PDRB nya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Depok melakukan impor barang dan jasa yang dikonsumsinya.



<http://sallepokkota.bps.go.id>

BAB V

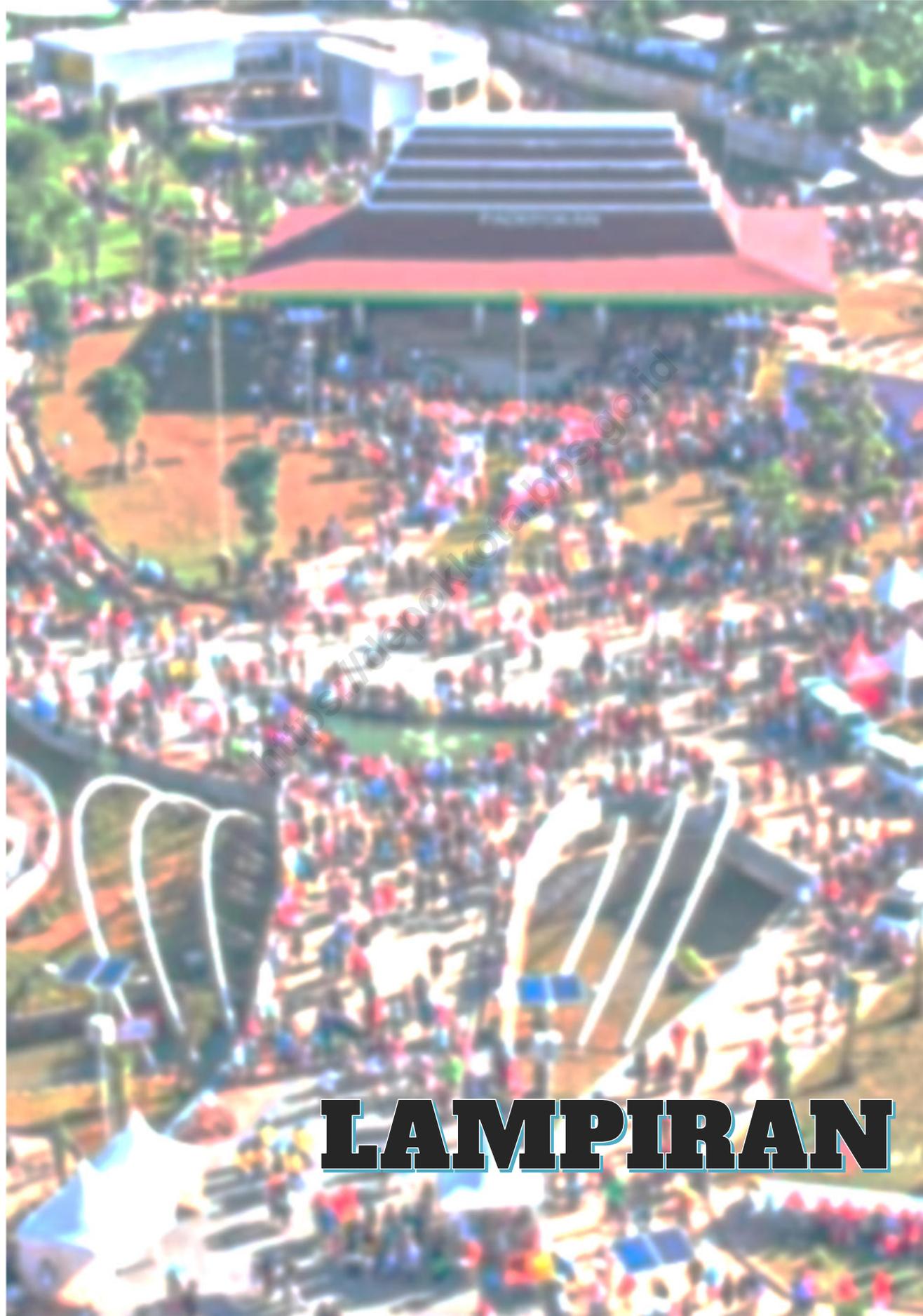
PENUTUP

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 sd 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Depok pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 sd 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran ini, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini

menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Depok terhadap ekonomi luar daerah.

<https://depokkota.bps.go.id>



<https://depolkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	62 810,93	67 440,12	74 880,46	81 709,24	88 098,28
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	16 873,61	19 234,25	22 212,71	24 500,50	27 491,71
1 b Pakaian dan Alas Kaki	1 640,42	1 747,85	1 903,43	2 081,06	2 225,21
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6 165,28	6 468,22	7 172,08	7 672,85	7 930,81
1 d Kesehatan dan Pendidikan	4 516,69	4 895,41	5 187,72	5 681,87	6 220,99
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	23 249,43	24 189,77	26 460,28	28 834,66	30 207,33
1 f Hotel dan Restoran	8 005,42	8 400,14	9 295,38	10 055,22	10 906,82
1 g Lainnya	2 360,08	2 504,48	2 648,87	2 883,08	3 115,40
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	659,22	636,54	670,52	728,74	778,18
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 126,78	2 533,80	2 487,92	2 588,60	2 774,78
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23 936,48	26 630,42	30 270,44	34 633,17	39 192,77
4 a Bangunan	19 822,21	22 034,90	25 094,49	28 630,70	32 968,89
4 b Non Bangunan	4 114,27	4 595,52	5 175,95	6 002,46	6 223,88
5 Perubahan Inventori	1 524,21	1 717,35	1 818,54	1 893,08	1 877,58
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	(42 524,98)	(45 627,17)	(51 719,10)	(57 189,59)	(61 679,60)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	48 532,64	53 331,05	58 408,78	64 363,25	71 041,99

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2015-2019**

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	49 757,92	51 808,60	55 033,94	57 983,05	60 789,18
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	11 662,23	12 236,75	13 630,08	14 557,95	15 492,95
1 b Pakaian dan Alas Kaki	1 476,55	1 548,08	1 636,09	1 720,25	1 789,61
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4 881,76	5 056,90	5 325,52	5 587,92	5 822,52
1 d Kesehatan dan Pendidikan	3 782,86	3 959,57	4 086,23	4 272,84	4 442,34
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	18 872,83	19 589,21	20 361,99	21 255,49	22 001,41
1 f Hotel dan Restoran	7 085,17	7 342,42	7 892,63	8 343,81	8 861,25
1 g Lainnya	1 996,52	2 075,67	2 101,39	2 244,77	2 379,09
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	501,44	470,66	483,82	508,71	524,66
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 454,28	1 668,93	1 594,77	1 628,96	1 735,80
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	18 253,30	19 861,64	21 769,17	23 967,94	25 862,03
4 a Bangunan	15 039,84	16 415,46	18 046,47	19 870,13	21 855,82
4 b Non Bangunan	3 213,47	3 446,18	3 722,70	4 097,82	4 006,21
5 Perubahan Inventori	1 101,43	1 137,48	1 138,39	1 122,08	1 094,38
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	(33 538,89)	(34 684,06)	(37 038,81)	(39 231,85)	(40 929,43)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	37 529,47	40 263,24	42 981,28	45 978,89	49 076,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	129,42	126,46	128,20	126,95	124,01
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	34,77	36,07	38,03	38,07	38,70
1 b Pakaian dan Alas Kaki	3,38	3,28	3,26	3,23	3,13
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,70	12,13	12,28	11,92	11,16
1 d Kesehatan dan Pendidikan	9,31	9,18	8,88	8,83	8,76
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	47,90	45,36	45,30	44,80	42,52
1 f Hotel dan Restoran	16,49	15,75	15,91	15,62	15,35
1 g Lainnya	4,86	4,70	4,54	4,48	4,39
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,36	1,19	1,15	1,13	1,10
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,38	4,75	4,26	4,02	3,91
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	49,32	49,93	51,83	53,81	55,17
4 a Bangunan	40,84	41,32	42,96	44,48	46,41
4 b Non Bangunan	8,48	8,62	8,86	9,33	8,76
5 Perubahan Inventori	3,14	3,22	3,11	2,94	2,64
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	(87,62)	(85,55)	(88,55)	(88,85)	(86,82)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	132,58	128,67	128,04	126,11	123,87
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	31,07	30,39	31,71	31,66	31,57
1 b Pakaian dan Alas Kaki	3,93	3,84	3,81	3,74	3,65
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,01	12,56	12,39	12,15	11,86
1 d Kesehatan dan Pendidikan	10,08	9,83	9,51	9,29	9,05
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	50,29	48,65	47,37	46,23	44,83
1 f Hotel dan Restoran	18,88	18,24	18,36	18,15	18,06
1 g Lainnya	5,32	5,16	4,89	4,88	4,85
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,34	1,17	1,13	1,11	1,07
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,88	4,15	3,71	3,54	3,54
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,64	49,33	50,65	52,13	52,70
4 a Bangunan	40,07	40,77	41,99	43,22	44,53
4 b Non Bangunan	8,56	8,56	8,66	8,91	8,16
5 Perubahan Inventori	2,93	2,83	2,65	2,44	2,23
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	(89,37)	(86,14)	(86,17)	(85,33)	(83,4)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	8,54	7,37	11,03	9,12	7,82
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	8,87	13,99	15,49	10,30	12,21
1 b Pakaian dan Alas Kaki	7,56	6,55	8,90	9,33	6,93
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,19	4,91	10,88	6,98	3,36
1 d Kesehatan dan Pendidikan	9,51	8,38	5,97	9,53	9,49
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	9,19	4,04	9,39	8,97	4,76
1 f Hotel dan Restoran	5,10	4,93	10,66	8,17	8,47
1 g Lainnya	6,59	6,12	5,77	8,84	8,06
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,88	(3,44)	5,34	8,68	6,78
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,70	19,14	(1,81)	4,05	7,19
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,27	11,25	13,67	14,41	13,17
4 a Bangunan	10,37	11,16	13,89	14,09	15,15
4 b Non Bangunan	9,80	11,70	12,63	15,97	3,69
5 Perubahan Inventori	4,87	12,67	5,89	4,10	(0,82)
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	7,05	7,29	13,35	10,58	7,85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	10,79	9,89	9,52	10,19	10,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	4,06	4,12	6,23	5,36	4,84
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	4,18	4,93	11,39	6,81	6,42
1 b Pakaian dan Alas Kaki	6,34	4,84	5,69	5,14	4,03
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,68	3,59	5,31	4,93	4,20
1 d Kesehatan dan Pendidikan	5,30	4,67	3,20	4,57	3,97
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,74	3,80	3,94	4,39	3,51
1 f Hotel dan Restoran	3,89	3,63	7,49	5,72	6,20
1 g Lainnya	3,93	3,96	1,24	6,82	5,98
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,07	(6,14)	2,80	5,14	3,14
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,79	14,76	(4,44)	2,14	6,56
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,16	8,81	9,60	10,10	7,90
4 a Bangunan	4,03	9,15	9,94	10,11	9,99
4 b Non Bangunan	4,76	7,24	8,02	10,08	(2,24)
5 Perubahan Inventori	(5,19)	3,27	0,08	(1,43)	(2,47)
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	1,07	3,41	6,79	5,92	4,33
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6,64	7,28	6,75	6,97	6,74

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	158,44	170,12	188,88	206,11	222,23
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	176,48	201,17	232,32	256,25	287,53
1 b Pakaian dan Alas Kaki	145,67	155,21	169,02	184,80	197,60
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	151,77	159,23	176,56	188,89	195,24
1 d Kesehatan dan Pendidikan	147,02	159,34	168,86	184,94	202,49
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	155,14	161,41	176,57	192,41	201,57
1 f Hotel dan Restoran	148,12	155,42	171,98	186,04	201,80
1 g Lainnya	164,92	175,01	185,10	201,46	217,70
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	158,33	152,88	161,04	175,03	186,90
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	174,50	207,89	204,13	212,39	227,66
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	175,23	194,95	221,60	253,54	286,91
4 a Bangunan	181,22	201,45	229,42	261,75	301,41
4 b Non Bangunan	151,16	168,84	190,16	220,53	228,66
5 Perubahan Inventori	131,99	148,72	157,48	163,94	162,60
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	144,19	154,71	175,37	193,92	209,14
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	182,44	200,48	219,57	241,95	267,06

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	125,51	130,69	138,82	146,26	153,34
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	121,97	127,98	142,56	152,26	162,04
1 b Pakaian dan Alas Kaki	131,12	137,47	145,29	152,76	158,92
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	120,18	124,49	131,10	137,56	143,34
1 d Kesehatan dan Pendidikan	123,13	128,88	133,00	139,08	144,60
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	125,94	130,72	135,87	141,83	146,81
1 f Hotel dan Restoran	131,09	135,85	146,03	154,38	163,95
1 g Lainnya	139,51	145,04	146,84	156,86	166,25
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	120,43	113,04	116,20	122,18	126,01
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	119,32	136,93	130,85	133,65	142,42
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	133,63	145,40	159,36	175,46	189,33
4 a Bangunan	137,50	150,07	164,99	181,66	199,81
4 b Non Bangunan	118,06	126,61	136,77	150,55	147,19
5 Perubahan Inventori	95,38	98,50	98,58	97,17	94,77
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	113,72	117,61	125,59	133,03	138,78
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	141,08	151,36	161,57	172,84	184,49

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9 Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	126,23	130,17	136,06	140,92	144,92
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	144,69	157,18	162,97	168,30	177,45
1 b Pakaian dan Alas Kaki	111,10	112,90	116,34	120,97	124,34
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	126,29	127,91	134,67	137,31	136,21
1 d Kesehatan dan Pendidikan	119,40	123,63	126,96	132,98	140,04
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	123,19	123,49	129,95	135,66	137,30
1 f Hotel dan Restoran	112,99	114,41	117,77	120,51	123,08
1 g Lainnya	118,21	120,66	126,05	128,44	130,95
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	131,47	135,24	138,59	143,25	148,32
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	146,24	151,82	156,00	158,91	159,86
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	131,14	134,08	139,05	144,50	151,55
4 a Bangunan	131,80	134,23	139,05	144,09	150,85
4 b Non Bangunan	128,03	133,35	139,04	146,48	155,36
5 Perubahan Inventori	138,38	150,98	159,75	168,71	171,57
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	126,79	131,55	139,63	145,77	150,70
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	129,32	132,46	135,89	139,98	144,76

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2015-2019

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 g)	4,31	3,12	4,53	3,57	2,84
1 a Makanan, Minuman, dan Rokok	4,50	8,64	3,68	3,27	5,44
1 b Pakaian dan Alas Kaki	1,14	1,63	3,04	3,98	2,78
1 c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,27	1,28	5,29	1,96	(0,80)
1 d Kesehatan dan Pendidikan	4,00	3,55	2,69	4,74	5,31
1 e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5,25	0,24	5,23	4,39	1,21
1 f Hotel dan Restoran	1,16	1,25	2,94	2,33	2,14
1 g Lainnya	2,57	2,07	4,47	1,89	1,96
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,70	2,87	2,47	3,37	3,54
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,55	3,81	2,75	1,86	0,59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,87	2,25	3,71	3,92	4,88
4 a Bangunan	6,09	1,85	3,59	3,62	4,69
4 b Non Bangunan	4,81	4,15	4,26	5,35	6,06
5 Perubahan Inventori	10,61	9,10	5,81	5,61	1,69
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah	5,91	3,75	6,15	4,40	3,38
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,89	2,43	2,60	3,01	3,41

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



<https://idepokkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Depok 16413

Telp : (021) 7710370, Fax: (021) 77825913

Email : bps3276@bps.go.id

Homepage: <https://depokkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-0925-91-2

